

LAPORAN NOTULENSI RAPAT

Rapat Finalisasi Bahan Bacaan Akuntabilitas Sosial

Kamis, 23 September 2021 – Pukul: 16.00-18.00

PENDAHULUAN

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) melalui Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Pedesaan mengadakan Rapat Finalisasi Bahan Bacaan Akuntabilitas Sosial. Rapat ini sehubungan dengan Kegiatan Penyusunan Bahan Pembelajaran Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) P3PD Subkomponen 2B. Dalam hal ini, Kemendesa PDTT mengundang beberapa narasumber untuk memberikan paparan terkait Akuntabilitas Sosial, salah satunya adalah Sekretariat Open Government Indonesia.

TUJUAN

Selain bertujuan untuk menyusun Bahan Bacaan Akuntabilitas Sosial dalam Kegiatan Penyusunan Bahan Pembelajaran Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) P3PD Subkomponen 2B, rapat ini juga bertujuan untuk mencari strategi yang tepat dalam implementasi akuntabilitas sosial di tingkat Desa.

PEMBAHASAN

1. **Bapak Sentot Surya Satria**, selaku perwakilan dari KOMPAK memberikan paparan awal.
 - Dijelaskan mengenai definisi akuntabilitas sosial, yakni suatu pendekatan untuk membangun akuntabilitas yang bertumpu pada keterlibatan warga negara. Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas sosial mengacu pada berbagai tindakan dan mekanisme yang dapat digunakan oleh warga untuk meminta pertanggungjawaban pejabat publik dan pegawai negeri.
 - Langkah-langkah akuntabilitas yang berbasis warga ini melengkapi dan memperkuat mekanisme akuntabilitas konvensional seperti *check and balances* politik, sistem akuntansi dan audit, aturan administratif, dan prosedur hukum.
 - UU Desa memberikan mandat yang kuat untuk menerapkan akuntabilitas sosial, yakni melalui pasal 74, 80, 82, 84, 88, serta mandate dari PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa.
 - Kondisi Akuntabilitas Sosial saat ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 dalam partisipasi masyarakat dan kelompok rentan. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan sosial dan mobilitas sehingga sulit untuk mengadakan forum musyawarah desa (Musdes).
 - Kompak sendiri mendorong pendekatan *civic engagement* yang menempatkan penduduk sebagai pusat dukungan kepada pemerintah untuk memberikan layanan dan membentuk sistem untuk mengawasi pertanggungjawaban pemerintah setempat.

- KOMPAK menilai hasil pelaksanaan dari UU Desa dapat lebih optimal dengan meningkatkan akuntabilitas sosial melalui: peningkatan desa dan kelompok sasaran, memfasilitasi akses kelompok miskin dan marjinal terhadap layanan dasar dengan wewenang desa yang ada, meningkatkan pemahaman Pemda dan Pemdes akan akuntabilitas sosial melalui advokasi.
- Desa sebagai mediator dan fasilitator yang menjembatani pemerintah dan Pemda ke warga dalam interaksi *supply* dan *demand*. Peran desa adalah menyediakan layanan publik yang mendukung peningkatan akses terhadap pelayanan dasar.
- Fokus dari KOMPAK pada tahun 2020-2021 adalah dengan memperkuat BPD dan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme umpan balik, literasi anggaran, dan mekanisme akuntabilitas sosial lainnya. Selain itu, penguatan kebijakan, pedoman, dan model akuntabilitas.
- Ada beberapa pembelajaran yang diambil dari praktik Akuntabilitas Sosial, yakni: praktik Akuntabilitas Sosial dapat mengatasi kelemahan antarwaktu akuntabilitas politik, seluruh pemangku kepentingan desa menemukan insentif untuk menjalankan Akuntabilitas Sosial, relugasi tanpa pemberdayaan hanya memfasilitasi akuntabilitas vertikal, fokus pemberdayaan memunculkan agen-agen perubahan dan memberpaiki pola interaksi.

2. **Bapak Sadwanto Purnomo**, selaku perwakilan dari Tim World Bank selanjutnya menyampaikan paparan sebagai berikut:

- Dalam hal alat perencanaan partisipatif dan kerangka scorecard akuntabilitas sosial, ada dua upaya yang dibahas, yakni penyesuaian sistem informasi desa (SID) dan memperkenalkan kembali pemetaan sosial.
- Penyesuaian SID dilakukan untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang situasi mereka. Hal ini dilaksanakan melalui pengembangan indikator utama yang standar. Selain itu pengembangan *dashboard* desa serta memastikan anggota masyarakat memiliki akses ke data. Contoh dari indikator yang dapat disesuaikan dengan tindak lanjut desa seperti jumlah anak putus sekolah, jumlah akses air bersih bagi rumah tangga, serta akses hukum bagi kelompok miskin.
- Dalam memperkenalkan kembali pemetaan sosial, masyarakat dapat memetakan indikator kunci dan membantu memvisualisasikan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- Beberapa gagasan kebijakan untuk memperkuat Akuntabilitas Sosial adalah antara lain: pengurangan “tsunami” regulasi karena permintaan data dan persyaratan administrasi membuat desa *overload*, optimalisasi peran Pemda dalam binwas Desa tertama melalui penguatan peran Camat dalam koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, penyelenggaraan program peningkatan kapasitas kader LKD dan kelompok di desa, serta advokasi pemerintah untuk memperjelas peran, tanggungjawab, serta wewenang desa dalam penyelenggaraan pelayanan.

3. **Ibu Maharani Wibowo**, selaku perwakilan Sekretariat Open Government Indonesia menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Dari seluruh jumlah desa, 10,20 persen desa masih tergolong sebagai Desa Tertinggal, dan 1,71 persen merupakan Desa Sangat Tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan model intervensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan status kemajuan Desa.
 - Permasalahan yang ditemukan adalah antara lain: jumlah desa yang memiliki pemukiman kumuh meningkat di hampir semua provinsi di Indonesia dengan penambahan dari 4,508 menjadi 5,654 Desa. Adanya *elite capture* yakni dominasi kelompok tertentu yang menjadikan kepentingan pribadinya sebagai tujuan dari institusi desa, hal ini perlu adanya kelembagaan inklusif di Desa yang mampu mengimbangi dan mengawasi kekuasaan para elit Desa. Implementasi SDGs di tingkat desa belum optimal, terlihat dari angka melek huruf, akses terhadap air minum, dan akses listrik yang jauh lebih rendah dibanding perkotaan. Kapasitas aparatur desa juga masih terbilang rendah dengan Sebagian aparatur desa memiliki kompetensi pendidikan yang rendah.
 - Dengan urgensi tersebut, OGI memasukkan akuntabilitas sosial dalam Rencana Aksi V 2020-2022 yang bekerjasama dengan OMS serta Kemendagri dan Kemendesa PDTT.
 - Adapun kunci penting dalam Akuntabilitas Sosial adalah Inklusif, dengan instrumen seperti *Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI), Gender Based Analysis+*, dan proses Ko-kreasi.
 - Praktik baik pelaksanaan Akuntabilitas Sosial di tingkat desa dapat dilihat sebagai contoh adalah pengelolaan anggaran desa yang terbuka dan partisipatif di Desa Wonolelo, DI Yogyakarta. Partisipasi masyarakat yang inklusif menentukan alokasi penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas pembangunan. Hasilnya adalah kebijakan daerah ramah ibu dan anak. Selain itu, akuntabilitas sosial dalam peningkatan pelayanan kesehatan publik di NTT juga adalah praktik baik. Dengan perbaikan layanan kesehatan, turut mengurangi jumlah kematian ibu dan anak, meningkatkan kondisi nutrisi balita, dan memperluas cakupan imunisasi anak.

KESIMPULAN

Paparan narasumber baik dari Tim Kompak dan Tim World Bank telah memberikan gambaran terkait pembelajaran sejauh ini serta gagasan untuk peningkatan upaya lebih lanjut. Komitmen dari pemerintah dalam kerangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa guna mencapai suatu tata Kelola yang akuntabel dan efektif juga diharapkan dapat terus terlaksana.

DOKUMENTASI

Recording

Membuat Indikator yang relevan dan dapat ditindaklanjuti

Indikator dalam SID

- + Desa Tanpa Kemiskinan #1
- + Desa Tanpa Kelaparan #2
- + Desa Sehat dan Sejahtera #3
- Pendidikan Desa Berkualitas #4
- + Keterlibatan Perempuan Desa #5
- + Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi #6
- + Desa Berenergi Bersih dan Terhubung #7
- + Pertumbuhan Ekonomi Desa Menata #8
- + Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan #9

Rekomendasi penyesuaian Indicators – dikaitkan dengan tindak lanjut desa

- Pendidikan Desa Berkualitas #4
 - Jumlah anak putus sekolah
- Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi #6
 - Jumlah rumah tangga yang belum bisa akses ke air bersih
 - Jumlah rumah tangga yang tidak mempunyai jamban
- Desa Damai Berkeadilan #16
 - Apakah orang miskin punya akses bantuan hukum ?
 - Apakah semua warga mempunyai

Rekomendasi:

- Kampanye pentingnya pendidikan
- Beasiswa untuk KK miskin
- Menargetkan akses air bersih kepada wilayah yang belum terjangkau
- Menyediakan paralegal atau bantuan hukum kpd klp miskin
- Fasilitasi pembuatan KTP

Yudhi Ramlan_OGI

sentot surya satria

Recording

Participants:

- Yudhi Ramlan_OGI
- SADWANTO PURNOMO
- sentot surya satria
- maharani wibowo
- Dewi Resminingayu_OGI
- Ibe Karyanto
- Maizir Akhmadin
- Pepi Permedi
- Ukah PSBLDP
- Abdur Rahman
- Lidjin Aulia
- Ade Wahid
- Open Government Indonesia
- Anis Yudya
- Theo_OGI
- lia
- Shinta Sulistyowati
- Steffi Alicia_DIT_PTPDP
- From Pepi Permedi to Everyone Terima kasih Bu Dewi..
- Fransisca Kiki Fajarwati
- Muhammad Nurun Najib

Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Record Reactions Leave